
Determinasi Faktor Ekonomi Terhadap Upah Minimum di Jawa Timur

Bintis Ti'anutud Diniati¹, Uswatun Khasanah²

¹Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

²Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

bintis.t.diniati@gmail.com, uswatunkhasanah8010@gmail.com

Abstrak

Upah minimum memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat kebijakan penetapan upah minimum guna menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap upah minimum provinsi di Jawa Timur pada periode 2019–2023, baik secara simultan maupun parsial. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode asosiatif, penelitian ini menganalisis data panel melalui uji statistik deskriptif serta pemilihan model terbaik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) merupakan model yang paling sesuai. Secara simultan, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, indeks harga konsumen, dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum. Namun, secara parsial, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengeluaran per kapita tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif, sementara indeks harga konsumen memiliki dampak negatif terhadap upah minimum di Jawa Timur.

Kata kunci: Indeks Harga Konsumen; Indeks Pembangunan Manusia; Pengeluaran Perkapita; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Upah Minimum Provinsi.

Abstract

Minimum wages play a crucial role in improving the welfare of workers. Therefore, the government needs to carefully consider the minimum wage setting policy in order to ensure a decent standard of living for workers and their families. This study aims to analyze the effect of macroeconomic variables on provincial minimum wages in East Java in the 2019–2023 period, both simultaneously and partially. Using a quantitative approach and associative method, this study analyzes panel data through descriptive statistical tests and selection of the best model. The analysis results show that the Random Effect Model (REM) is the most suitable model. Simultaneously, the labor force participation rate, human development index, consumer price index, and per capita expenditure have a significant influence on the minimum wage. However, partially, the labor force participation rate and per capita expenditure do not show a significant effect, while the human development index has a positive effect, while the consumer price index has a negative impact on the minimum wage in East Java.

Keywords: Consumer Price Index; Human Development Index; Per Capita Expenditure; Labor Force Participation Rate; Provincial Minimum Wage.

PENDAHULUAN

Upah merupakan salah satu aspek fundamental yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pemberian upah yang adil, sesuai dengan hasil kerja dan kebutuhan hidup, menjadi perhatian utama bagi pengusaha (Charysa, 2013). Besaran upah ditentukan berdasarkan durasi kerja yang ditempuh atau jumlah output yang

dihasilkan oleh pekerja. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja sangat bergantung pada upah yang mereka terima, mengingat pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, peningkatan upah menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan secara keseluruhan.

Teori ekonomi klasik memberikan penjelasan terkait upah, dengan keyakinan bahwa terdapat cadangan upah yang cenderung menyesuaikan dengan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum tenaga kerja (Jhingan, 2016). David Ricardo juga berpendapat bahwa upah memiliki peran penting dalam menentukan pendapatan antara modal dan tenaga kerja. Ketika harga barang yang dibutuhkan tenaga kerja meningkat, tingkat upah pun akan ikut naik (Jhingan, 2016). Secara umum, tingkat upah diatur oleh pemerintah, yang bertujuan memberikan keadilan bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam menetapkan upah. Kebijakan pengupahan yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan tenaga kerja dan keluarganya memperoleh standar kehidupan yang layak, serta mendorong peningkatan produktivitas dan daya beli mereka (Ketiasih, 2017). Kebijakan ini dikenal dengan upah minimum, yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja dari rendahnya nilai upah dan mencegah eksploitasi.

Setiap daerah memiliki kebijakan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan yang layak di daerah tersebut. Upah minimum terbagi menjadi dua kategori, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Di Indonesia, penentuan UMP harus lebih tinggi dari rata-rata UMP nasional, dan menjadi acuan bagi daerah yang menggunakan UMK dalam sistem pengupahan. Besaran UMP tidak boleh lebih tinggi daripada UMK, sehingga setiap daerah memiliki perbedaan dalam besaran UMP dan UMK yang sesuai dengan kondisi ekonomi daerah masing-masing.

Sejak tahun 2019 hingga 2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan positif pada tingkat upah setiap tahunnya. Peningkatan upah minimum tersebut disebabkan oleh penyesuaian pemerintah terhadap kondisi perekonomian daerah. Selain itu, penetapan kenaikan upah minimum ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan jaminan agar tenaga kerja mendapatkan upah yang pantas.

Tenaga kerja menginginkan upah yang diterima tidak hanya layak, tetapi juga cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, stabilitas dan peningkatan upah setiap tahunnya diharapkan dapat terjaga. Perkembangan UMP Jawa Timur yang terus meningkat kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Per Kapita.

Salah satu faktor yang memengaruhi upah minimum provinsi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mencerminkan penawaran tenaga kerja di pasar, yang memungkinkan pemerintah untuk menentukan besaran upah yang layak. Ketika lapangan pekerjaan terbatas, TPAK cenderung menurun, yang menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja ini biasanya diserap oleh sektor informal yang tidak terikat oleh regulasi upah, yang akhirnya dapat menurunkan tingkat upah (Sutama et al., 2019).

Menurut teori pandangan klasik, TPAK mencerminkan hubungan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terhadap upah. Teori ini menjelaskan bahwa upah akan menyesuaikan diri untuk mengatasi kelebihan penawaran tenaga kerja di pasar. Ketika permintaan tenaga kerja menurun, akan tercipta kelebihan tenaga kerja, yang

menyebabkan penurunan upah. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan di pasar (Mankiw et al., 2012).

Selain TPAK, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur juga diperkirakan dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan serta kesejahteraan suatu negara, dan dapat menggambarkan tingkat kualitas tenaga kerja dalam hal keterampilan dan kemampuan bekerja. IPM berhubungan langsung dengan upah, karena upah yang layak dapat mendorong peningkatan produktivitas dan jumlah produksi tenaga kerja (Aprilia & Aida, 2024).

Pengaruh IPM terhadap UMP sesuai dengan teori upah efisiensi, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara upah dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan upah akan memicu peningkatan produktivitas kerja. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik akan menghasilkan produktivitas tinggi, yang pada gilirannya akan mendorong tingkat upah yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas kontribusi produktif tersebut (Mankiw, 2007).

IPM yang tinggi akan mendorong kenaikan upah, termasuk UMP. Semakin baik kualitas tenaga kerja di suatu daerah, semakin menarik bagi pengusaha untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja dengan upah tinggi meningkat, sehingga tenaga kerja akan menerima upah lebih tinggi seiring dengan peningkatan hasil (output) yang dihasilkan (Mulyadi, 2008).

Selain TPAK dan IPM, Indeks Harga Konsumen (IHK) juga diduga mempengaruhi besaran UMP yang ditetapkan pemerintah. IHK mengukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa dalam periode tertentu. Ketika harga barang dan jasa meningkat, tenaga kerja cenderung menuntut kenaikan upah untuk mencocokkan peningkatan biaya hidup yang timbul akibat kenaikan harga tersebut. Dari perspektif tenaga kerja, upah ditentukan oleh perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang mereka konsumsi (Sukirno, 2007).

Teori yang diajukan oleh David Ricardo menjelaskan hubungan antara IHK dan upah. Teori ini menyatakan bahwa upah tenaga kerja dipengaruhi oleh biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika harga barang yang dikonsumsi tenaga kerja meningkat, upah juga cenderung mengalami kenaikan. Namun, dalam jangka panjang, lonjakan harga barang dan jasa dapat menurunkan daya beli tenaga kerja. Oleh karena itu, penyesuaian tingkat upah terhadap kenaikan harga barang menjadi hal yang esensial guna menjaga stabilitas daya beli pekerja. Indeks Harga Konsumen (IHK) berperan sebagai indikator yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah (Jhingan, 2016).

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur kemungkinan dipengaruhi oleh pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita merujuk pada pengeluaran untuk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga dalam periode tertentu (Halim, 2012). Pengeluaran perkapita menjadi salah satu indikator penting untuk menggambarkan kesejahteraan tenaga kerja. Kesejahteraan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh besarnya upah yang diterima; semakin tinggi upah yang diperoleh, semakin besar kemungkinan kesejahteraan tenaga kerja akan meningkat.

Pengeluaran perkapita menggambarkan daya beli tenaga kerja melalui konsep Purchasing Power Parity (PPP) dan berfungsi sebagai indikator dalam menilai tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah (Mahran, 2012). Indikator ini mencerminkan sejauh mana pencapaian dalam mewujudkan kehidupan yang layak, yang berkaitan dengan tingkat konsumsi riil per kapita. Kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar, sebagaimana tercermin dalam rata-rata konsumsi per kapita, digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan serta pencapaian pembangunan yang bertujuan

meningkatkan kualitas hidup. Kesejahteraan tenaga kerja dianggap meningkat apabila konsumsi riil per kapita mengalami pertumbuhan (Mahrany, 2012).

Menurut teori ekonomi klasik, upah akan cenderung menyesuaikan dengan jumlah uang yang dibutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya (Jhingan, 2016). Agar daya beli tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, mereka membutuhkan pendapatan atau upah yang setara atau lebih tinggi dari tingkat daya beli tersebut. Dengan demikian, tenaga kerja akan dapat mencapai kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pengeluaran perkapita bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi yang layak bagi tenaga kerja di setiap daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Perkapita terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh entitas yang memiliki karakteristik sesuai dengan objek penelitian, yaitu Provinsi Jawa Timur. Adapun teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah non-probability sampling, di mana tidak semua elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel (Sugiyono, 2018). Sampel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sumenep, dengan periode penelitian yang mencakup tahun 2019 hingga 2023. Untuk pengolahan dan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Estimasi Model Data Panel

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengevaluasi apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Common Effect Model (CEM) lebih sesuai dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun hasil dari uji Chow dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	246.550983	(5,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	124.121042	5	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Setelah FEM terpilih, langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman guna menentukan apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) lebih tepat untuk digunakan dalam analisis.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Adapun hasil uji Hausman dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	14.167681	4	0.0068

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada Cross-section random sebesar 0,0008, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0008 < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Dengan terpilihnya FEM, proses pemilihan model telah selesai, sehingga uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model yang paling sesuai dalam analisis penelitian ini.

Pengujian Statistik *Fixed Effect Model*

Tabel 3. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	3.572202	4.026244	0.887229	0.3834
X1_TPAK	0.020539	0.010447	1.966087	0.0605
X2_IPM	0.007862	0.002193	3.584884	0.0014
X3_IHK	-0.002901	0.000412	-7.036330	0.0000
LOG(X4_PKAP)	0.576213	0.291637	1.975786	0.5593

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

<i>R-squared</i>	0.875809	<i>Mean dependent var</i>	14.75691
<i>Adjusted R-squared</i>	0.855938	<i>S.D. dependent var</i>	0.269108
<i>S.E. of regression</i>	0.023317	<i>Akaike info criterion</i>	-4.579008
<i>Sum squared resid</i>	0.013592	<i>Schwarz criterion</i>	-4.273342
		<i>Hannan-Quinn</i>	
<i>Log likelihood</i>	81.38692	<i>criter.</i>	-4.609890
<i>F-statistic</i>	44.07567	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.221093
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan tabel 3 hasil estimasi *Fixed Effect Model* dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = 3,572202 - 0,020539X_1 + 0,007862X_2 - 0,002901X_3 + 0,576213X_4 + \mu_{it} \quad (1)$$

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 3,572202 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen mengalami peningkatan satu satuan secara rata-rata, maka variabel dependen, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), akan meningkat sebesar 3,572202.
- Koefisien regresi variabel X1 (TPAK) bernilai negatif sebesar -0,020539, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akan menyebabkan UMP menurun sebesar 0,020539, demikian pula sebaliknya.

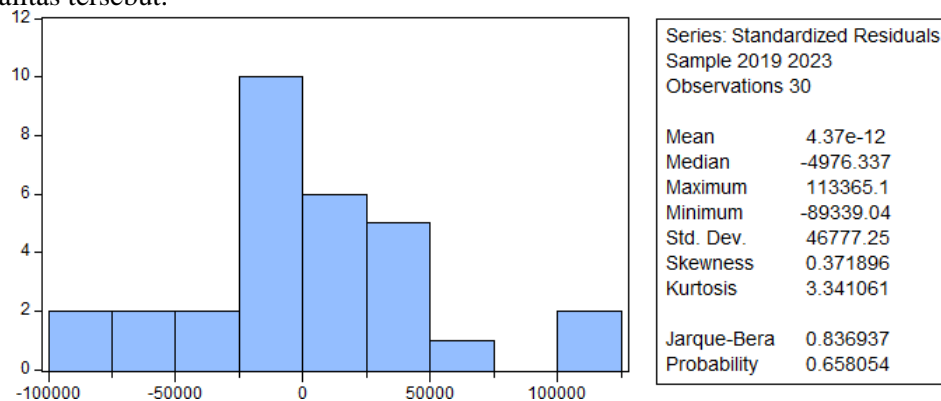
- c. Koefisien regresi variabel X2 (IPM) bernilai positif sebesar 0,007862, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkatkan UMP sebesar 0,007862, begitu pula sebaliknya.
- d. Koefisien regresi variabel X3 (IHK) bernilai negatif sebesar -0,002901, yang mengindikasikan bahwa kenaikan satu satuan dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) akan menurunkan UMP sebesar 0,002901, dan sebaliknya.
- e. Koefisien regresi variabel X4 (Pengeluaran Perkapita) bernilai positif sebesar 0,576213, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Pengeluaran Perkapita akan meningkatkan UMP sebesar 0,576213, demikian pula sebaliknya.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini memenuhi asumsi-asumsi klasik yang disyaratkan. Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik, yang mencakup:

a. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Sebuah model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji Jarque-Bera (J-B). Berikut ini disajikan hasil dari pengujian normalitas tersebut.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan gambar 1 dari uji normalitas, nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,658054, yang lebih besar dari 0,05 ($0,658054 > 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa H_0 diterima, yang berarti data mengikuti distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi linier atau hubungan antara variabel bebas dalam model regresi. Keberadaan multikolinieritas dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Oleh karena itu, data yang baik seharusnya tidak mengalami masalah multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil dari pengujian multikolinieritas:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1_TPAK	X2_IPM	X3_IHK	LOG(X4_PKAP)
X1_TPAK	1.000000	-0.558170	-0.005227	-0.198507
X2_IPM	-0.558170	1.000000	-0.020409	0.615010

	X1_TPAK	X2_IPM	X3_IHK	LOG(X4_PKAP)
X3_IHK	-0.005227	-0.020409	1.000000	0.067076
LOG(X4_PKAP)	-0.198507	0.615010	0.067076	1.000000

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh nilai korelasi berada di bawah 0,90. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas. Jika model menunjukkan adanya heteroskedastisitas, maka kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi tidak valid. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Heteroskedasticity Test: White</i>			
<i>F-statistic</i>	1.963162	<i>Prob. F(4,24)</i>	0.1325
<i>Obs*R-squared</i>	7.149384	<i>Prob. Chi-Square(4)</i>	0.1282
<i>Scaled explained SS</i>	8.603788	<i>Prob. Chi-Square(4)</i>	0.0718

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square pada Obs R-squared lebih besar dari 0,05 ($0,1282 > 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi yang signifikan antara observasi dalam berbagai periode waktu. Keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi bias serta varians yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Oleh karena itu, model regresi yang baik seharusnya bebas dari masalah autokorelasi. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian autokorelasi:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</i>			
<i>F-statistic</i>	0.675825	<i>Prob. F(2,22)</i>	0.5190
<i>Obs*R-squared</i>	1.678591	<i>Prob. Chi-Square(2)</i>	0.4320

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan Tabel 6, nilai probabilitas Chi-Square pada Obs R-squared sebesar 0,4320, yang melebihi ambang batas 0,05 ($0,4320 > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil dari uji F:

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

<i>F-statistic</i>	<i>Prob. (F-statistic)</i>	Keterangan
44.07567	0.0000	Berpengaruh signifikan

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan tabel 7, nilai F-Statistic tercatat sebesar 44.07567 dengan nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel TPAK, IPM, IHK, dan Pengeluaran Perkapita secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu UMP. Oleh karena itu, H1 dapat diterima.

b. Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial setiap variabel independen yaitu TPAK, IPM, IHK, dan Pengeluaran Perkapita terhadap variabel dependen yaitu upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur. Berikut hasil dari uji T (parsial):

Tabel 8. Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	<i>t-statistic</i>	<i>Prob.</i>	Keterangan
C	0.887229	0.3834	-
TPAK	1.966087	0.0605	Tidak berpengaruh signifikan
IPM	3.584884	0.0014	Berpengaruh positif dan signifikan
IHK	-7.036330	0.0000	Berpengaruh negatif dan signifikan
Pengeluaran Perkapita	1.975786	0.5593	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan tabel 8, hasil uji T dapat dilihat pengaruh setiap variabel independen yang mempengaruhi upah minimum kabupaten/kota, yaitu:

1) Variabel TPAK

Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0605, yang melebihi ambang batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa TPAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur, sehingga hipotesis H2 ditolak. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Armidi et al. (2018), yang menyatakan bahwa secara parsial, TPAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jambi selama periode 2000-2015. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berdampak pada besaran UMP di Jambi. Hal tersebut disebabkan karena rata-rata perkembangan TPAK pada tahun 2000 hingga 2015 hanya sebesar 0,09 persen saja. Sedangkan, rata-rata perkembangan UMP Jambi sebesar 16,77 persen. Ketimpangan rata-rata dari TPAK dan UMP menunjukkan bahwa perkembangan UMP meningkat, tapi tidak sejalan dengan perkembangan TPAK yang relatif stagnan karena nilainya di bawah satu persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Wibowo (2018), yang mengungkapkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut disebabkan karena data TPAK di Provinsi DIY cenderung fluktuatif dari tahun 1990-2016. Pada tahun 1990 sampai 2009, kategori yang dijadikan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke

atas. Selanjutnya, mulai tahun 2010, kategori yang dijadikan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Oleh karena itu, terjadi perbedaan data yang tersedia, sehingga data TPAK cenderung fluktuatif dan tidak selalu naik di setiap tahun. Sedangkan, data UMP setiap tahun selalu naik. Oleh karena itu, terjadi ketidaksesuaian perkembangan TPAK dan UMP (Wibowo, 2018).

Hasil penelitian ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Putri & Aisyah (2024), yang menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh terhadap upah minimum. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian upah yang didasarkan pada mekanisme penawaran dalam pasar tenaga kerja. Penurunan penawaran pasar tenaga kerja menyebabkan ketersediaan tenaga kerja yang tinggi dan upah tenaga kerja yang menjadi rendah (Putri & Aisyah, 2024).

2) Variabel IPM

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0014, yang lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur, sehingga hipotesis H3 dapat diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2014), yang mengungkapkan bahwa IPM memiliki dampak positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi terhadap peningkatan upah minimum di tingkat provinsi. Oleh karena itu, IPM memiliki hubungan positif dengan upah minimum, di mana peningkatan IPM akan diikuti dengan peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan tingkat upah (Susanto, 2014).

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan yang dikemukakan oleh Damanik & Zalukhu (2021), yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Faktor yang mendasari hubungan tersebut adalah kondisi IPM di Kota Pematangsiantar yang tergolong baik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan upah minimum di tingkat provinsi. Sehingga, ketika IPM mengalami kenaikan akan mempengaruhi meningkatnya Upah Minimum Kota Pematangsiantar (Damanik & Zalukhu, 2021).

3) Variabel IHK

Variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa IHK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur, sehingga hipotesis H4 dapat diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armidi et al. (2018) yang menunjukkan bahwa secara parsial, IHK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jambi selama periode 2000–2015. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan IHK cenderung menurunkan upah minimum provinsi, karena kenaikan harga barang mengurangi daya beli upah riil. Selain itu, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Sitorus (2020) yang menemukan bahwa IHK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi di Indonesia pada periode 2009–2018. Dengan demikian, peningkatan IHK berpotensi menyebabkan penurunan upah minimum provinsi. (Sitorus, 2020).

4) Variabel Pengeluaran Perkapita

Variabel Pengeluaran Perkapita memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5593, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKAP tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga H5 ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Kusumaningrum & Nurhayati (2023) yang mengungkapkan bahwa rata-rata

pengeluaran per kapita memiliki pengaruh positif terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), di mana peningkatan pengeluaran per kapita cenderung diikuti oleh kenaikan upah minimum. (Kusumaningrum & Nurhayati, 2023). Selain itu, hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Yunita & Sirait (2020) yang menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap UMK di Pulau Kalimantan. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik pengeluaran per kapita di Pulau Kalimantan yang sejalan dengan klasifikasi UMK, di mana wilayah barat Pulau Kalimantan cenderung memiliki pengeluaran per kapita dan UMK yang rendah, sedangkan wilayah timur menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita dan UMK yang lebih tinggi (Yunita & Sirait, 2020).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabilitas variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), di mana semakin mendekati 1, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor error. Sebaliknya, apabila nilai R^2 mendekati 0, maka kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin rendah (Wahyudi, 2017). Berikut ini disajikan hasil Uji Determinasi dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-squared</i>	0.875809
<i>Adjusted R-squared</i>	0.855938

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan Tabel 9, nilai Adjusted R Square tercatat sebesar 0,855938. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel independen, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Perkapita, secara simultan berkontribusi sebesar 85% terhadap variabel dependen, yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, sebesar 15% dari variabilitas UMK dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Perkapita secara simultan berpengaruh terhadap besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur. Namun, berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, TPAK dan IHK tidak memiliki pengaruh langsung terhadap UMK. Sementara itu, IPM terbukti berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP), yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat cenderung diikuti oleh kenaikan upah minimum. Di sisi lain, pengeluaran perkapita tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap upah minimum, meskipun fluktuasi pengeluaran ini berdampak pada daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan inflasi dan kondisi ekonomi daerah, lebih dominan dalam menentukan besarnya upah minimum dibandingkan faktor-faktor lain seperti TPAK dan IHK.

Sebagai saran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur disarankan untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi lokal dalam menetapkan upah minimum, baik UMP maupun UMK. Indikator seperti IPM dan pengeluaran perkapita perlu dipertimbangkan

dengan baik karena keduanya memiliki hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas rentang waktu dan sampel daerah, serta menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif, seperti VAR atau VECM, untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan panjang serta kontribusi masing-masing variabel terhadap penetapan upah minimum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A., & Aida, N. (2024). Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi Lampung. *Jurnal Ekobistek*, 13(1), 7–12. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i1.766>
- Armidi, A., Erfit, E., & Yulmardi, Y. (2018). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 7(1), 33–42. <https://doi.org/10.22437/jels.v7i1.4654>
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 277–285. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.2489>
- Damanik, D. C., & Zalukhu, R. S. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Di Kota Pematangsiantar. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 38–51. <https://doi.org/10.36985/ekuilmomi.v3i1.119>
- Halim, M. A. (2012). Teori Ekonomika Edisi 1. *Tangerang: Jelajah Nusa*.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (1st ed.). RajaGrafindo Pesada.
- Ketiasih, L. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (Umr) Di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(1), 148–157.
- Kusumaningrum, R. R., & Nurhayati, S. F. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Pekalongan Tahun 2017-2021. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 510–517. <https://doi.org/10.37531/mirai.v8i1.4433>
- Mahrany, Y. (2012). Pengaruh indikator komposit indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. *Skripsi: Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hassanudin, Makassar*.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi* (6th ed.). Erlangga.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro* (1st ed.). Salemba Empat.
- Mulyadi, S. (2008). *Ekonomi sumber daya manusia : dalam perspektif pembangunan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Putri, L. L. I., & Aisyah, S. (2024). Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.

Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(1), 385.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1434>

Sitorus, E. T. B. (2020). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Indonesia*. Universitas Islam Riau.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta CV.

Sukirno, S. (2007). *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. RajaGrafindo Persada.

Susanto, B. S. (2014). Penyerapan tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap upah minimum di Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 1(1), 21–32. <https://doi.org/10.55171/.v1i1.102>

Sutama, I. N., Asmini, A., & Astika, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(3), 281–291. <https://doi.org/10.58406/jeb.v7i3.545>

Wahyudi, S. T. (2017). *Statistika Ekonomi Konsep, Teori, dan Penerapannya*. UB Press.

Wibowo, A. A. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yunita, I., & Sirait, T. (2020). Penerapan SAR Pada Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Pulau Kalimantan Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics, 2019(1)*, 396–406. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.134>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
